

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akbar, Patrialis, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arifin dkk (Tim Peneliti), Firmansyah, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, KRHN bekerja sama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2003, *Pengantar Mahkamah Konstitusi Kompleksi Konstitusi Undang-Undang dan Peraturan di 78 negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia.

_____, Jimly, 2005, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Indonesia, Jakarta.

_____, Jimly, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, Jimly, 2011, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Cetak biru, *Membangun Mahkamah Konstitusi*, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Sekretariat Jendral MKRI, 2004.

Febridiansyah, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Hadjon, Philipus M, dan Tatiek Sri Djatmiati, 1999, *Menulis Laporan Penelitian Hukum*, Unair, Surabaya

Harun, Refly, 2019, *Penafsiran Konstitusi*, Rajawali Press, Depok.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, edisi revisi Banyumedia Publishing, Malang.

Indrayana, Denny, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang.

KPK, , 2015, “*Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*”, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harjianti, 2014, *Memahami Konstitusi makna dan Artikulasi*, Rajawali Press, Jakarta.

Mochtar, Zainal Arifin, 2017, *Lembaga Negara Independen*, Rajawali Press, Depok.

Muhjad, Hadin, dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta, Yogyakarta.

Natabaya, H.A.S., 2004, “*Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945*”, dalam Refly Harun, dkk (editor), *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.

Siahaan, Maruar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sirajudin dan Winardi, 2015 *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara press malang Jatim.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif suatu*

Tinjauan Singkat, raja Grafindo, Jakarta.

Sukardja, Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syahuri, Taufiqurrihman, 2011, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, kencana, Jakarta.

Tauda, Gunawan A., 2012, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent*

Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan),

Genta Press, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta.

B. Jurnal

Agustiwi, Asri, 2014, “Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia”, *Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 no. 1 Maret 2014

Aris, Ismail, 2018, “Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol

5 Nomor 1 Juni 2018.

Huda, Miftakhul, 2007, “Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3 September 2007*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Monteiro, Josef M., 2012, “Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 42 No.2 April-Juni 2012.

Simamora, Janpatar, 2013, “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum FH Universitas*

Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 25 No. 3 Oktober 2013.

Suwarnatha, I Nyoman Ngurah, *“Penguatan Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Dasar 1945”*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.II, No.1, Juni 2012.

Sutiyoso, Bambang, 2008, *“Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasi Terhadap Pencari Keadilan”*, *Jurnal Hukum* No.3 Vol. 15 Juli 2008.

C. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2019.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor No. 012-016
019/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37-39/PUU
VII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017.

E. Internet

Abdul Fickar Hadjar <https://kumparan.com/kumparannews/dampak-revisi-uu-bagaimana-independensi-kpk-1rtjUZr00fI> di akses tanggal 5 Desember 2019
Pukul 22.45 WIB

Gandjar Laksamana Bonaprapta,
<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/19271831/jadi-lembaga-eksekutif-kpk-dikhawatirkan-hanya-jadi-perpanjangan-tangan> diakses pada
tanggal 09 Desember 2019 Pukul 21.20

Mahfud Md Putusan MK Soal Angket KPK Bertentangan Dengan 4 Putusan.
<https://nasional.kompas.com> diakses pada tanggal 14 Juni 2019, Pukul 21.30
WIB

Perbedaan Lembaga Negara dan Alat Negara, <https://www.hukumonline.com>
diakses pada Taggal 27 Juni 2019 Pukul 15.50 WIB

F. Wawancara

Zainal Arifin Mochtar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada